

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I  
TAHUN 2017**



**BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58  
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011  
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2017 dapat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini merupakan pertanggung jawaban publik Badan Pengawasan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, dengan maksud untuk melihat sejauh mana hasil kerja yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja dilingkungan Badan Pengawasan. Oleh karena itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini semoga komitmen dan loyalitas kita dapat lebih ditingkatkan pada waktu yang akan datang.

Harapan kami, adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang peduli dalam usaha-usaha perbaikan sistem pengawasan, peningkatan implementasi pengawasan dan internalisasi nilai-nilai pengawasan sehingga berdampak pada terwujudnya budaya pengawasan dilingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017. Semoga bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, Januari 2018  
Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
  
NUGROHO SETIADI



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengawasan sebagai Pengawas Internal diberikan tugas untuk melakukan seluruh proses kegiatan yang meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan sehingga kinerja yang diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan efektifitas tugas tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung dari tahun ketahun selalu melakukan aktualisasi kemampuan guna meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Pada tahun 2017, Badan Pengawasan melaksanakan kegiatan antara lain:

### 1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2017, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) orang, yang terdiri dari tenaga teknis yudisial 52 orang, tenaga non teknis yudisial 85 orang, dan tenaga Honorer 16 orang dengan komposisi jabatan sebagai Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Staf dan Honorer dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Pejabat Struktural :

- Pejabat Eselon I : 1 orang
- Pejabat Eselon II : 4 orang (Sekretaris dan 3 Inspektur wilayah)
- Pejabat Eselon III : 4 orang
- Pejabat Eselon IV : 15 orang

#### B. Pejabat Fungsional

- Hakim Tinggi : 36 orang
- Hakim Yustisial : 16 orang
- Auditor : 12 orang
- Auditor Kepegawaian : 9 orang
- Analis Kepegawaian : 1 orang

C. Staf : 39 orang

D. Honorer : 16 orang

## **2. Penanganan Pengaduan**

Pada tahun 2017, Jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sejumlah 2.642 pengaduan. Untuk pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan sejumlah 1.789 pengaduan, untuk pengaduan dari instansi / stakeholder Mahkamah Agung sejumlah 362 pengaduan, Pengaduan Aplikasi Siwas sejumlah 328 pengaduan dan Pengaduan dari Satgas sejumlah 163 pengaduan.

## **3. Penjatuhan Hukuman Disiplin**

Sebagai tindak lanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I, pada tahun 2017 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 156 aparat peradilan.

## **4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim**

Tahun 2017 atas usulan Komisi Yudisial telah dilakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebanyak dua kali, dengan terlapor 2 orang hakim.

## **5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatannya selaku APIP yaitu diantaranya Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA K/L, Reviu RKBMN Online, Reviu Tender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ, Pemeriksaan Keuangan, Audit Pengadaan Barang/Jasa, *Consulting dan Assurance*.

## **6. Pemeriksaan Reguler**

Tahun 2017 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler pada 125 Satuan Kerja (Satker) yang meliputi : Lingkungan Peradilan Umum wilayah I, II, III, IV berjumlah 67 satker. Lingkungan Peradilan Agama wilayah I, II, III, IV berjumlah 45 satker. Lingkungan Peradilan Militer wilayah I, II, III, IV berjumlah 6 satker dan Lingkungan Peradilan TUN wilayah I, II, III, IV berjumlah 7 satker.



## **7. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan SK SEKMA No. 20A/SEK/SK/IV/2016 melakukan evaluasi terhadap satker eselon I Pusat dan peradilan tingkat banding berjumlah 74 satker.

Tahun 2017 terdapat 1 Satker (1,35 %) memperoleh nilai A, 41 Satker (55,40%) memperoleh nilai BB, 30 Satker (40,54%) memperoleh nilai B, 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai CC, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai C. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 ada kecenderungan nilai BB dan nilai B meningkat. Untuk melakukan evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajiban pengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya

## **8. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas**

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas Internal pada tahun 2017 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 102 Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 55 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 39 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 5 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 3 satker.

## **9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

- a) Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 449 temuan pemeriksaan dengan 883 rekomendasi. Hingga 31 Desember 2017 sebanyak 797 rekomendasi atau sebesar 90,26% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 64 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
- b) Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp39.519.245.314,74 nilai rekomendasi sebesar Rp29.479.054.601,63. Hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp24.273.013.323,80 sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 82,34 %, nilai yang

masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.682.812.459,00 atau sebesar 15,89 % dan nilai sebesar Rp523.228.818,83 atau sebesar 1,77 % tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

- c) Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar 91,51 %, sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar 8,49%.

#### **10. Sosialisasi Hakim Pengawas Bidang, Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan dan Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan**

Pada tahun 2017 Badan Pengawasan telah melaksanakan Sosialisasi Hakim Pengawas Bidang, Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan dan Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada beberapa wilayah yaitu:

- a) Sosialisasi Hakim Pengawas Bidang dilaksanakan di Lampung yang diikuti oleh 80 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan dan Hakim Pengawas Bidang
- b) Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Surabaya yang diikuti oleh 108 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Tinggi, Panitera Muda Hukum dan Tenaga IT. Makassar yang diikuti oleh 76 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah, Hakim Pengawas Bidang, Panitera Muda Hukum, dan Operator IT.
- c) Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Surabaya yang diikuti oleh 300 peserta terdiri dari Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan/Panitera Muda Perdata/ Panitera Muda Hukum, dan Jurusita. Ternate yang diikuti oleh 40 peserta terdiri dari Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Pengganti, Jurusita

#### **11. Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)**

Pada tahun 2017 kegiatan Quality Assurance (penjaminan kualitas) telah dilaksanakan pada 3 lokasi yaitu Palembang yang diikuti oleh 72 peserta terdiri dari Panitera, Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kasir. Bandung yang diikuti oleh 98 peserta, dan Semarang yang diikuti oleh 104 peserta terdiri dari Panitera dan Sekretaris Tingkat Banding, Panitera dan Sekretaris Tingkat Pertama.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	vi
I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	15
C. Sistematika Penyajian .....	18
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	20
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 .....	20
1. Visi dan Misi .....	20
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	21
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	22
C. Rencana Kinerja Tahun 2017 .....	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	23
E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan .....	27
III. Akuntabilitas Kinerja .....	29
A. Pengukuran Kinerja .....	29
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	30
C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja .....	42
IV. Penutup.....	45
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	45

### Lampiran-lampiran :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matrik Rencana Strategis 2015– 2019
4. SK Kepala Badan Pengawasan tentang Tim LKjIP
5. Rencana Kinerja Tahun 2017, 2018
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2017, 2018

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pengawasan yang lebih yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kemanfaatan dan penyelenggaraan lebih baik. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Badan Pengawasan pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan antara lain:

#### **1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM**

Pada tahun 2017, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, staf dan Honorer. Jumlah aparatur pada Badan Pengawasan yang berjumlah 153 orang terdiri dari tenaga teknis yudisial 52 orang, tenaga non teknis yudisial 85 orang dan tenaga honorer 16 orang.

Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI pada tahun 2017 telah mengadakan peningkatan SDM dengan cara mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf untuk mengikuti Diklat dan Bimtek sebanyak 23 Diklat dan Bimtek.

Pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dapat diperinci sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama Bimtek</b>	<b>Jumlah peserta</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Tujuan</b>
1	Pelatihan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi dan Penerjemahan Peta Jalan SDM	2 orang	Badan Urusan Administrasi MARI dan EU-UNDP SUSTAIN	Peningkatan Kompetensi SDM
2	Bimtek Penyesunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	1 orang	KPPN Jakarta VI	Peningkatan Kompetensi SDM
3	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	148 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
4	Sosialisasi Program Taspen	3 orang	KPPN Jakarta IV	Peningkatan Kompetensi SDM
5	Bimtek Jabatan Auditor Kepegawaian	6 orang	BKN	Peningkatan Kompetensi SDM
6	Sosialisasi Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara antar Kuasa Pengguna Barang	2 orang	BUA MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
7	Pelatihan Penyusunan Peta Jalan Manajemen SDM Berbasis kompetensi	2 orang	EU-UNDP	Peningkatan Kompetensi SDM
8	Assessment Center	7 orang	BUA MARI	Peningkatan



				Kompetensi SDM
9	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	2 orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
10	Sosialisasi Penatausahaan Barang Persediaan	6 orang	Badan Urusan Administrasi	Peningkatan Kompetensi SDM
11	Bimtek Penelahaan Online TA 2018	5 Orang	Kementerian Keuangan	Peningkatan Kompetensi SDM
12	Diklat Penilaian Maturitas SPIP Bagi pegawai di lingkungan APIP	2 Orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
13	Sosialisasi dalam rangka penyusunan RKA-K/L T.A 2018	3 Orang	Kementerian Keuangan	Peningkatan Kompetensi SDM
14	Assesment	7 Orang	Badan Pengawasan	Peningkatan Kompetensi SDM
15	Sosialissi Monitoring dan Evaluasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2017	2 Orang	Kementerian Keuangan	Peningkatan Kompetensi SDM
16	Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2017	2 Orang	Kementerian Keuangan	Peningkatan Kompetensi SDM

17	Diklat Self Assesment Maturitas SPIP dan PK APIP	3 Orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
18	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (e-LHKPN)	8 Orang	Mahkamah Agung RI	Peningkatan Kompetensi SDM
19	Sosialisasi Wajib Pajak Bendahara	2 Orang	Kementerian Keuangan	Peningkatan Kompetensi SDM
20	Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Pegawai	2 Orang	Mahkamah Agung RI	
21	Sosialisasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2017	1 Orang	Kementerian Keuangan	Peningkatan Kompetensi SDM

## 2. Penanganan Pengaduan

Tahun 2017 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 2.642 pengaduan, dengan rincian :

### A. Penanganan Pengaduan yang masuk

- 1) Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan, sejumlah 1.789 pengaduan
- 2) Pengaduan dari Instansi / Stakeholder Mahkamah Agung, sejumlah 362 Pengaduan
- 3) Pengaduan dari Aplikasi SIWAS sejumlah 328 Pengaduan
- 4) Pengaduan dari SATGAS sejumlah 163 Pengaduan

### B. Penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti

- 1) Ditelaah sejumlah 60 Pengaduan
- 2) Diperiksa Tim Pemeriksa sejumlah 122 Pengaduan

- 3) Dijawab dengan surat sejumlah 632 Pengaduan
- 4) Didelegasi ke Pengadilan Tingkat Banding sejumlah 203 Pengaduan
- 5) Didelegasi ke Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah 913 Pengaduan
- 6) Memorandum sejumlah 264 Pengaduan
- 7) Masih dalam proses penyelesaian sejumlah 127 Pengaduan
- 8) Diarsipkan sejumlah 321 Pengaduan

Catatan : Kriteria Surat yang diarsip ( tidak dapat ditindak lanjuti ) Surat yang identitas pelapor dan terlapor tidak jelas, tidak disertai data dukung dan tidak menunjuk substansi secara jelas ( tidak menyebutkan nama pengadilan atau nomor perkara yang dimaksud )

### 3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Sebagai tindaklanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I, pada tahun 2017 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 156 aparat peradilan, yaitu :

- a) Hakim, sejumlah 60 orang
- b) Panitera, sejumlah 11 orang
- c) Sekretaris, sejumlah 6 orang
- d) Panitera Muda, sejumlah 14 orang
- e) Panitera Pengganti, sejumlah 21 orang
- f) Jurusita, sejumlah 9 orang
- g) Jurusita Pengganti, sejumlah 9 orang
- h) Pejabat Struktural, sejumlah 9 orang
- i) Staf, sejumlah 15 orang
- j) Honorer, sejumlah 2 orang

### 4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Tahun 2017 atas usulan Komisi Yudisial telah dilakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk 2 orang Hakim. data hasil MKH seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim**

NO	NAMA	JABATAN	JENIS HUKUMAN
1	A.R	Hakim PA. Lbh	Pemberhentian dengan hormat
2	E P	Hakim PTUN Jb	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun

## 5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan selaku APIP sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2 : Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP**

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan	Pada tahun 2017, Bawas MA RI melakukan 3 (tiga) kali Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA yakni atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2016 pada Bulan Februari 2017, Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun 2017 pada bulan Juli 2017 dan Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 pada bulan Nopember 2017;
2	Reviu RKA K/L	Pada tahun 2017 dilaksanakan 3 kali.
3	Reviu RKBMN Online	Pada tahun 2017 dilaksanakan 3 kali.
4	Reviu Tender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ	Pada tahun 2017, Bawas MA RI melakukan 1 (satu) kali reviu Tender Pra DIPA dan 3 (tiga) kali Reviu PA PBJ;
5	Pemeriksaan Keuangan	Terdapat 13 (tigabelas) satker yang dilakukan Pemeriksaan Keuangan pada tahun 2017;
6	Audit Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat 10 (sepuluh) Satker yang dilakukan Audit PBJ Tahun 2017;</li><li>- Terdapat Satker yang melakukan Pemutusan Kontrak yakni pada PT Ambon;</li></ul>
7	Consulting dan Assurance	Pada tahun 2017 dilaksanakan 5 kali.

## 6. Pemeriksaan Reguler

Tahun 2017 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler pada 125 Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 67 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 45 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 6 satker dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 7 satker.

Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan reguler oleh Badan Pengawasan adalah untuk menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang lebih baik dan profesional sehingga akan tercipta tertib administrasi yang berkelanjutan dan penyalahgunaan maupun penyimpangan administratif/kewenangan akan berkurang dan pada akhirnya tidak akan terjadi lagi.

Pengawasan reguler dilakukan pada 125 obyek pemeriksaan dimana untuk tahun 2017 telah melakukan kontrak kinerja terhadap 4 satuan kerja, yaitu :

- a. Pengadilan Negeri Liwa
- b. Pengadilan Negeri Padang
- c. Pengadilan Agama Tembilahan
- d. Pengadilan Negeri Tenggara

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Manajemen Peradilan, temuannya sejumlah 484 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan, dll.
- 2) Administrasi Persidangan, temuannya sejumlah 624 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, dll.
- 3) Administrasi Umum, temuannya sejumlah 2048 temuan.
- 4) Kinerja Pelayanan Publik, temuannya sejumlah 543 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum), dll.

## **7. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud untuk meningkatkan transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi oleh karena itu kegiatan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan SK SEKMA No. 20A/SEK/SK/IV/2016 melakukan evaluasi terhadap satker eselon I Pusat dan peradilan tingkat banding berjumlah 74 satker, dengan maksud untuk:



- Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP;
- Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP;
- Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**Tabel 1.3 : Hasil Evaluasi LkjIP Tujuh Eselon I Pusat dan Empat Lingkungan Peradilan Tingkat Banding**

No	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015 ( 2016 )			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2016	2017
1	>90 - 100	AA	-	-
2	>80 - 90	A	8	1
3	>70 - 80	BB	36	41
4	>60 - 70	B	20	30
5	>50 - 60	CC	5	1
6	>30 - 50	C	3	1
7	0 - 30	D	2	-
<b>Jumlah</b>			74	74

Tahun 2017 terdapat 1 Satker (1,35 %) memperoleh nilai A, 41 Satker (55,40%) memperoleh nilai BB, 30 Satker (40,54%) memperoleh nilai B, 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai CC, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai C. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 ada kecenderungan nilai BB dan nilai B meningkat. Untuk melakukan evaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajiban pengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya.

**Tabel 1.4 : Nilai Evaluasi LKjIP Tahun 2017 Satker Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding**

NO.	NAMA SATKER	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN KINERJA	SKOR	KATEGORI
		BOBOT 30%	BOBOT 25%	BOBOT 15%	BOBOT 10%	BOBOT 20%		
1	BADAN PENGAWASAN	20,20	19,38	12,00	7,75	15,00	74,33	BB
2	BUA	20,28	15,88	11,46	7,75	15,00	70,37	BB
3	KEPANITERAAN	19,75	18,63	10,89	7,75	15,00	72,02	BB
4	DITJEN BADILAG	19,91	15,53	10,07	6,75	12,29	64,55	B
5	DITJEN BADILUM	20,77	17,73	9,80	5,50	11,67	65,47	B
6	DITJEN BADIMILTUN	18,57	18,25	10,34	5,50	10,63	63,29	B

7	BALITBANG DIKLAT KUMDIL	19,38	15,65	10,07	5,75	11,88	<b>62,73</b>	<b>B</b>
8	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	21,04	18,97	11,58	7,13	12,29	<b>71,01</b>	<b>BB</b>
9	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	22,67	18,74	11,67	6,46	13,33	<b>72,87</b>	<b>BB</b>
10	PENGADILAN TINGGI MEDAN	22,06	18,85	12,00	7,46	12,92	<b>73,29</b>	<b>BB</b>
11	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	20,37	19,00	11,11	6,58	13,33	<b>70,39</b>	<b>BB</b>
12	PENGADILAN TINGGI JAMBI	20,72	17,84	11,20	6,58	11,67	<b>68,01</b>	<b>B</b>
13	PENGADILAN TINGGI PEKANBARU	25,02	20,90	12,94	7,33	13,96	<b>80,15</b>	<b>A</b>
14	PENGADILAN TINGGI PADANG	23,01	18,75	10,64	4,50	11,88	<b>68,78</b>	<b>B</b>
15	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	22,23	19,00	12,47	7,54	15,00	<b>76,24</b>	<b>BB</b>
16	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	20,36	18,25	12,23	4,88	13,33	<b>69,05</b>	<b>B</b>
17	PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA	24,59	19,38	12,23	7,88	15,00	<b>79,08</b>	<b>BB</b>
18	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	24,06	19,38	11,77	7,46	13,33	<b>76,00</b>	<b>BB</b>
19	PENGADILAN TINGGI BANTEN	23,95	19,38	12,70	7,75	13,96	<b>77,74</b>	<b>BB</b>
20	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	25,36	19,00	12,70	7,88	13,96	<b>78,90</b>	<b>BB</b>
21	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	22,65	16,14	10,64	7,00	12,29	<b>68,72</b>	<b>B</b>
22	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	22,85	18,63	12,19	7,33	11,67	<b>72,67</b>	<b>BB</b>
23	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	24,46	19,52	12,00	7,33	12,92	<b>76,23</b>	<b>BB</b>
24	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	21,10	17,09	7,73	5,33	8,96	<b>60,21</b>	<b>B</b>
25	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	21,31	19,00	12,23	0,38	15,00	<b>67,92</b>	<b>B</b>
26	PENGADILAN TINGGI MANADO	22,52	13,42	6,70	5,63	1,88	<b>50,15</b>	<b>CC</b>
27	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	21,59	19,38	11,30	6,38	11,67	<b>70,32</b>	<b>BB</b>
28	PENGADILAN TINGGI PALU	22,87	19,00	12,23	6,38	13,33	<b>73,81</b>	<b>BB</b>
29	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	23,95	19,38	12,23	7,75	15,00	<b>78,31</b>	<b>BB</b>
30	PENGADILAN TINGGI KENDARI	21,87	19,00	12,23	7,67	12,92	<b>73,69</b>	<b>BB</b>
31	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	23,04	19,38	10,45	6,71	11,67	<b>71,25</b>	<b>BB</b>
32	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	22,56	17,73	11,11	6,71	11,67	<b>69,78</b>	<b>B</b>
33	PENGADILAN TINGGI KUPANG	20,54	17,73	10,92	6,38	13,33	<b>68,90</b>	<b>B</b>
34	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	16,40	12,48	6,00	4,38	1,88	<b>41,14</b>	<b>C</b>
35	PENGADILAN TINGGI MATARAM	22,43	17,58	10,97	7,54	11,67	<b>70,19</b>	<b>BB</b>
36	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	21,91	18,10	11,20	6,46	11,67	<b>69,34</b>	<b>B</b>
37	PENGADILAN TINGGI AMBON	21,40	18,25	10,17	6,71	11,67	<b>68,20</b>	<b>B</b>
38	MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH	17,04	16,02	11,39	6,58	11,88	<b>62,91</b>	<b>B</b>
39	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	17,80	18,25	10,17	6,71	11,67	<b>64,60</b>	<b>B</b>
40	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	24,59	19,00	11,95	7,25	15,00	<b>77,79</b>	<b>BB</b>
41	PENGADILAN TINGGI AGAMA BABEL	20,31	18,10	10,69	6,46	11,67	<b>67,23</b>	<b>B</b>
42	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	23,86	19,38	12,23	7,13	11,88	<b>74,48</b>	<b>BB</b>
43	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	23,93	18,48	11,16	7,46	10,00	<b>71,03</b>	<b>BB</b>
44	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	20,98	17,06	10,17	6,58	10,00	<b>64,79</b>	<b>B</b>
45	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	23,38	19,38	11,30	6,58	13,96	<b>74,60</b>	<b>BB</b>
46	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR	24,89	19,38	11,67	7,75	15,00	<b>78,69</b>	<b>BB</b>

LAMPUNG								
47	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	23,33	19,38	12,23	7,67	15,00	77,61	BB
48	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	24,37	19,00	10,41	0,25	11,67	65,70	B
49	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	25,58	19,75	9,23	5,83	13,96	74,35	BB
50	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	23,95	19,38	12,23	7,75	15,00	78,31	BB
51	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	24,66	20,13	11,77	4,88	15,00	76,44	BB
52	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	23,81	19,38	11,77	7,46	13,33	75,75	BB
53	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	24,06	19,38	12,23	7,46	13,33	76,46	BB
54	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	24,00	18,74	10,64	7,13	12,29	72,80	BB
55	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	24,61	19,38	12,47	7,88	13,96	78,30	BB
56	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	22,72	19,38	10,73	6,58	11,67	71,08	BB
57	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	20,37	18,85	10,92	6,25	10,00	66,39	B
58	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	20,72	15,39	10,69	6,71	11,67	65,18	B
59	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	21,21	16,02	10,64	7,00	12,29	67,16	B
60	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	22,78	19,38	12,23	7,33	11,25	72,97	BB
61	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	24,38	19,38	11,77	7,75	11,88	75,16	BB
62	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	22,39	19,00	10,73	7,00	11,67	70,79	BB
63	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	20,04	18,25	10,17	6,71	11,67	66,84	B
64	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	23,95	19,38	12,00	7,21	15,00	77,54	BB
65	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	23,26	16,81	11,34	6,92	11,67	70,00	B
66	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	22,87	19,00	10,73	7,00	11,67	71,27	BB
67	PENGADILAN TINGGI TUN MEDAN	20,06	16,92	10,17	6,46	11,67	65,28	B
68	PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA	19,34	15,68	10,17	6,58	11,67	63,44	B
69	PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA	21,07	19,38	10,73	7,33	10,00	68,51	B
70	PENGADILAN TINGGI TUN MAKASSAR	22,96	19,00	10,27	7,33	8,54	68,10	B
71	DILMILTAMA	20,91	17,44	10,41	7,21	11,67	67,64	B
72	DILMILTI I MEDAN	20,52	15,13	10,17	7,21	10,00	63,03	B
73	DILMILTI II JAKARTA	23,29	19,00	11,20	7,21	11,88	72,58	BB
74	DILMILTI III SURABAYA	22,13	19,38	10,88	7,54	13,33	73,26	BB
	<b>JUMLAH</b>	1637,87	1352,64	819,83	494,39	908,43	5213,16	
	<b>RATA-RATA</b>	<b>22,13</b>	<b>18,28</b>	<b>11,08</b>	<b>6,68</b>	<b>12,28</b>	<b>70,45</b>	<b>BB</b>

## 8. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.03 Tahun 2013 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No.37/BP/SK/2016, Badan Pengawasan melakukan Pemeriksaan Kinerja pada Satker secara tematik berfokus pada

pengelolaan keuangan perkara, pengelolaan PNBP yang berasal dari pelayanan perkara dan pelayanan publik.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas Internal pada tahun 2017 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 102 Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 55 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 39 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 5 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 3 satker.

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan sebagai berikut:

- 1) Hasil Temuan Bidang Pelayanan Publik, meliputi :
  - a) Kualitas Standar Pelayanan sejumlah 145 temuan
  - b) Kualitas Sistem Informasi Pelayanan sejumlah 87 temuan
  - c) Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan sejumlah 114 temuan
  - d) Proses Penanganan Pengaduan sejumlah 69 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja berkaitan dengan Standar Pelayanan Publik mencapai 145 temuan (34,94%), hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk evaluasi dan peningkatan SDM.

Terkait Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik menduduki urutan kedua yakni terdapat 114 temuan (27,47%), terkait Sistem Informasi Pelayanan terdapat 87 temuan (20,96%) dan terkait Penanganan Pengaduan terdapat 69 temuan (16,63%).

- 2) Hasil Temuan Bidang PNBP
  - a) Pemungutan PNBP jumlah 32 temuan
  - b) Penyeteroran PNBP jumlah 44 temuan
  - c) Penatausahaan PNBP jumlah 53 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan PNBP lebih dominan yakni mencapai 53 temuan (41,09%),

sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya penatausahaan PNBPN sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).

- 3) Jenis Temuan Bidang Keuangan Perkara
  - a) Panjar Biaya Perkara jumlah 83 temuan
  - b) Biaya Proses jumlah 181 temuan
  - c) Pengembalian Sisa Panjar jumlah 58 temuan
  - d) Pengembalian Biaya Perkara tidak melalui Bank jumlah 13 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan yakni mencapai 181 temuan (54,03%), sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan sistem penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.

## **9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

- a) Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 449 temuan pemeriksaan dengan 883 rekomendasi. Hingga 31 Desember 2017 sebanyak 797 rekomendasi atau sebesar 90,26% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 64 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
- b) Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp39.519.245.314,74 nilai rekomendasi sebesar Rp29.479.054.601,63. Hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp24.273.013.323,80 sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 82,34 %, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.682.812.459,00 atau sebesar 15,89 % dan nilai sebesar Rp523.228.818,83 atau sebesar 1,77 % tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
- c) Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar 91,51 %, sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar 8,49%.



## **10. Kegiatan *Consulting***

### **a) Sosialisasi Hakim Pengawas Bidang**

Diselenggarakannya Sosialisasi Hakim Pengawas Bidang adalah untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan kualitas serta peran aktif Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak positif terwujudnya Visi Mahkamah Agung RI, karena Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai peran yang strategis di bidang pengawasan, disamping merupakan pembinaan karir bagi Hakim yang bersangkutan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan Hakim Pengawas Bidang serta memaksimalkan capaian kinerjanya sehingga tugas dan fungsi pengawasan yang dimiliki Pengadilan Tingkat Pertama yang di dalamnya terkandung dimensi pengendalian dan pembinaan dapat dilakukan secara sinergis, dan diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan tugas peradilan, sehingga kebijakan Mahkamah Agung RI dibidang pengawasan dapat terwujud secara optimal, efisien dan efektif.

### **b) Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan**

Diselenggarakannya Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan adalah untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pengelolaan pengaduan dan juga pengawasan melekat oleh pengadilan tingkat banding, yang dalam hal ini koordinator pengawasan adalah Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, serta pelaksanaannya oleh Hakim Pengawas Daerah serta Hakim Pengawas Bidang dengan tujuan agar pengadilan tingkat banding sebagai *voorpost/* kawal depan Mahkamah Agung RI lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan melekat, baik untuk pengawasan yang bersifat teknis maupun non teknis.

### **c) Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan**

Diselenggarakannya Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, dan Juru Sita dalam melaksanakan bidang pengawasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI masih dijumpai sebagian para Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Juru Sita yang belum

optimal di dalam melakukan tugas-tugas kepaniteraan dan kejurusitaannya, hal tersebut antara lain disebabkan kurangnya pemahaman terhadap Tugas Pokok masing-masing dan juga kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat.

Karena maraknya OTT yang berkaitan melemahnya kinerja peradilan, maka untuk mendorong tumbuhnya kesadaran para Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Jurusita untuk meningkatkan kemampuannya dibidang sistem pengawasan aparatur peradilan, maka Badan Pengawasan mengadakan kegiatan Consulting dengan materi-materi meliputi: Pemuliaan Peradilan dan Peningkatan Pengawasan.

#### **d) Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)**

Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) diselenggarakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas temuan yang berkaitan dengan:

1. Keuangan perkara dan keuangan DIPA.
2. Memastikan bahwa seluruh proses atau prosedur kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan sesuai dengan standar / ketentuan yang berlaku.
3. Membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi dari pelaporan keuangan berbasis kas ke basis akrual dimana permasalahan pelaporan keuangan berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding pelaporan keuangan berbasis kas pada tahun sebelumnya.

Hasil pembahasan QA secara garis besar yakni :

1. Pengelolaan keuangan DIPA dan Pengelolaan Barang Milik Negara harus berpedoman pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
2. Keuangan Perkara dan Uang titipan pihak ketiga harus berpedoman pada kebijakan Mahkamah Agung.
3. Badan Pengawasan melakukan identifikasi resiko dalam pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan Perkara sehingga diperoleh peta resiko beserta mitigasinya.

Pada tahun 2017 kegiatan Quality Assurance (penjaminan kualitas) telah dilaksanakan pada 3 lokasi yaitu Palembang yang diikuti oleh 72 peserta terdiri dari Panitera, Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kasir. Bandung yang diikuti

oleh 98 peserta, dan Semarang yang diikuti oleh 104 peserta terdiri dari Panitera dan Sekretaris Tingkat Banding, Panitera dan Sekretaris Tingkat Pertama.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan;

Badan Pengawasan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan Pengawasan;
2. Inspektorat Wilayah I;
3. Inspektorat Wilayah II;
4. Inspektorat Wilayah III;
5. Inspektorat Wilayah IV.

### **1) Sekretariat Badan Pengawasan;**

Sekretariat Badan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- c) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- d) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

2) Inspektorat Wilayah I;

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah I yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah I;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

3) Inspektorat Wilayah II;

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah II yang meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

4) Inspektorat Wilayah III;

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah III yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

5) Inspektorat Wilayah IV.

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah IV yang meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

Ruang lingkup pengawasan meliputi : penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, finansial peradilan dan perilaku aparatur pengadilan, sedangkan sasaran pengawasan meliputi : lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

### **C. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2017 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

#### **Kata Pengantar**

#### **Ikhtisar Eksekutif**

#### **I. Pendahuluan**

- a. Latar Belakang
- b. Tugas dan Fungsi
- c. Sistematika Penyajian

#### **II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

##### **A. Rencana Strategis 2015 - 2019**

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis

##### **B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

##### **C. Rencana Kinerja Tahun 2017**

**D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

**E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan**

**III. Akuntabilitas Kinerja**

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja

**IV. Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

**Lampiran-Lampiran**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2015 - 2019**

Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagai berikut:

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan serta mempertahankan Laporan Keuangan Mahkamah Agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan perencanaan keuangan.

#### **1. Visi dan Misi**

Visi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan adalah ” Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa”.

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan Pengawasan menjabarkannya kedalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding di bidang pengawasan;
3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pada tabel berikut :

**Tabel 2.1. Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI**

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi			
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler			1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung
	Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas			
	Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa			
	Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan			
	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana			
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan			
	Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang			
	Jumlah pegawai yang mengikuti Assesment			
	Jumlah Penguatan APIP / <i>Consulting</i>			
	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan			
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan			
Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan				

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) dan RPJM 2015- 2019.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	jumlah pengaduan yang diterima dibagi Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan Triwulan website dari Ortala

## C. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2017 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2017 Badan Pengawasan menetapkan komitmen kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan	001 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-

	Pengaduan)		Mahkamah Agung RI	Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	-	170	Rp6.673.221.000	
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100%						
	1. Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	114 LHP			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	97	Rp5.306.857.000	
	2. Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	95 LHP				95	Rp3.319.683.000	
	3. Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13 LHP				12	Rp 409.598.000	
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	21 LHP				21	Rp 524.227.000	
	5. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 kegiatan					Rp 833.839.000	
	6. Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	3 kegiatan (74 LKJIP)		1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	001 Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan kompetensi sistem pengawasan	2	Rp 34.998.000	
	7. Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	1 kegiatan					3	Rp 279.015.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	1 kegiatan					1	Rp 138.296.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	2 kegiatan					20	Rp 733.253.000
	10. Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	2 kegiatan					2	Rp 985.915.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	7 LHP					2	Rp 191.000.000
12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 kegiatan						Rp 43.370.000	
					002 Dokumen tata kelola	7		
					004 Pelaksanaan MKH	4		

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017, maka dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengawasan dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Pengawasan dan Inspektur Wilayah I sampai dengan IV Badan Pengawasan dengan Kepala Badan Pengawasan.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2017.

#### 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100%		Rp6.673.221.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	114 LHP	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp5.306.857.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	95 LHP		Rp3.319.683.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13 LHP		Rp 409.598.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	21 LHP		Rp 524.227.000
	5. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 kegiatan		Rp 833.839.000
	6. Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	3 kegiatan (74 LKJIP)		Rp 34.998.000
	7. Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	1 kegiatan		Rp 279.015.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	1 kegiatan		Rp 138.296.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	2 kegiatan		Rp 733.253.000
	10. Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	2 kegiatan		Rp 985.915.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	7 LHP		Rp 191.000.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 kegiatan		Rp 43.370.000

Jumlah Anggaran : **Rp19.473.272.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

## 2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 kegiatan	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 833.839.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	3 kegiatan (74 LKjIP)		Rp 34.998.000
	Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	1 kegiatan		Rp 279.015.000
	Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	1 kegiatan		Rp 138.296.000
	Jumlah Penguatan APIP / Consulting	2 kegiatan		Rp 733.253.000
	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	2 kegiatan		Rp 985.915.000
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	7 LHP		Rp 191.000.000
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 kegiatan		Rp 43.370.000

Jumlah Anggaran : **Rp3.239.686.000,-**

Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

## 3. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti ( <b>Surat Pengaduan</b> )	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi ( <b>kasus</b> )	100%		Rp1.807.623.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	35 LHP		Rp1.433.518.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	30 LHP		Rp1.007.667.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	3 LHP		Rp 101.714.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	5 LHP		Rp 160.595.000

Jumlah Anggaran : **Rp4.511.117.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan



#### 4. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti <b>(Surat Pengaduan)</b>	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi <b>(kasus)</b>	100%		Rp1.985.615.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	26 LHP		Rp1.331.091.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	33 LHP		Rp 743.459.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa / audit kepegawaian	4 LHP	Rp 85.293.000	
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	10 LHP	Rp 129.562.000	

**Jumlah Anggaran : Rp4.275.020.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

#### 5. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti <b>(Surat Pengaduan)</b>	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi <b>(kasus)</b>	100%		Rp1.802.027.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	36 LHP		Rp1.455.383.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	24 LHP		Rp 924.984.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	3 LHP	Rp 96.280.000	
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	3 LHP	Rp 101.539.000	

Jumlah Anggaran : **Rp4.380.213.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

## 6. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti <b>(Surat Pengaduan)</b>	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi <b>(kasus)</b>	100%		Rp1.077.956.000
Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	17 LHP		Rp1.086.865.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	8 LHP		Rp 643.573.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	3 LHP		Rp 126.311.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	3 LHP	Rp 132.531.000	

Jumlah Anggaran : **Rp3.067.236.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

## E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

Perbandingan capaian kegiatan Badan Pengawasan tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 : Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2016**

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target	Capaian Persentase
	I	II	III	IV			
<b>Kasus</b>	51	122	51	23	<b>247</b>	189 LHP	<b>131%</b>
<b>Reguler*</b>	32	79	39	25	<b>175</b>	100 LHP	<b>175%</b>
<b>Audit PBJ</b>	3	4	3	2	<b>12</b>	12 LHP	<b>100%</b>
<b>Reviu LK dan RKAKL</b>	0	4	0	0	<b>4</b>	3 LHP	<b>133%</b>
<b>Reviu Tepra dan PBJ *</b>	0	6	0	0	<b>6</b>	0 LHP	<b>0%</b>
<b>Audit Kinerja / Audit Integritas</b>	30	34	27	10	<b>101</b>	100 LHP	<b>101%</b>

<b>Evaluasi LkjIP</b>	0	3	0	0	<b>3</b>	3 LHE	<b>100%</b>
<i>Quality Assurance</i>	184	0	78	0	<b>262</b>	150 orang	<b>175%</b>
<b>Rakor / Sosialisasi Pengaduan</b>	143	448	129	80	<b>800</b>	455 orang	<b>176%</b>
<b>Monitoring</b>	3	3	3	3	<b>12</b>	12 LHP	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>446</b>	<b>703</b>	<b>330</b>	<b>144</b>	<b>1622</b>	<b>1024</b>	<b>119,10 %</b>

\* Kegiatan Satgas untuk melakukan pemeriksaan reguler berkaitan dengan penyelesaian perkara dan penegakan disiplin pada Unit Eselon I Mahkamah Agung

**Tabel 2.3 : Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2017**

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target	Capaian Persentase
	I	II	III	IV			
Kasus	53	103	49	23	228	170 LHP	134%
Reguler	35	35	36	19	125	114 LHP	110%
Audit PBJ	3	5	3	3	14	13 LHP	108%
Reviu LK dan RKAKL	-	6	-	-	6	2 LHP	300%
Pemeriksaan Kinerja / Integritas	31	33	25	13	102	95 LHP	107%
Pemeriksaan Keuangan	6	12	3	3	24	21 LHP	114%
Evaluasi LkjIP	20	25	19	10	74	74 LHE	100%
<i>Quality Assurance</i>	1	1	-	-	2	2 Kegiatan	100%
Rakor / Sosialisasi Pengaduan	1	1	-	-	2	2 Kegiatan	100%
Sidak	2	12	2	1	17	20 LHP	85%
Monitoring	3	3	3	3	12	12 LHP	100%
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>236</b>	<b>140</b>	<b>75</b>	<b>606</b>	<b>525</b>	<b>136%</b>

\* Kegiatan Satgas untuk melakukan pemeriksaan reguler berkaitan dengan penyelesaian perkara dan penegakan disiplin pada Unit Eselon I Mahkamah Agung

Capaian kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung selama tahun 2017 mencukupi target yang direncanakan dari target 100 % yaitu mencapai 136%.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kualitas hasil pengukuran dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran - sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien	1. Presentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100% (2.642 surat pengaduan)	100% (2.642 surat pengaduan)	100%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100% 170 LHP	134% 228 LHP	134%
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	114 LHP	125 LHP	110%
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	95 LHP	102 LHP	107%
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13 LHP	14 LHP	108%
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	21 LHP	24 LHP	114%
	5. Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

	6. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	7. Jumlah Penguatan APIP/ Consulting	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	8. Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	9. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	10. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	7 LHP	7 LHP	100%
	11. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	12. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LKjIP	74 LKjIP	100%

\* Capaian :  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Capaian}} \times 100\%$

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan dalam melaksanakan Visi dan Misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerjanya, diuraikan sebagai berikut :



Sasaran ini terdiri dari 2 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien	1. Presentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100% (2.642 surat pengaduan)	100% (2.642 surat pengaduan)	100%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100% 170 LHP	134% 228 LHP	134%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

### Sasaran 1

#### Indikator kinerja ke - 1 : *Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti*

Tabel 3.2 *Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti*

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %
		2016			2017		
1	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100 (1.341)	100	100	100 (2.642)	100	100

Jumlah pengaduan yang diterima Badan Pengawasan tahun 2017 adalah 2.642 pengaduan yang terdiri dari:

- Pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawasan, sejumlah 1.789 pengaduan
- Pengaduan dari instansi/stakeholder Mahkamah Agung, sejumlah 362 pengaduan
- Pengaduan dari aplikasi SIWAS, sejumlah 328 pengaduan, dan
- Pengaduan yang berasal dari SATGAS Badan Pengawasan, sejumlah 163 pengaduan. SATGAS Badan Pengawasan menerima pengaduan dari masyarakat yang datang ke Mahkamah Agung.

Pengaduan tersebut oleh Badan Pengawasan dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu antara lain:

- Ditelaah : 60 Pengaduan

Surat pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawasan, oleh Kepala Badan Pengawasan didisposisi kepada Inspektur Wilayah I s/d IV dan oleh Inspektur Wilayah I s/d IV diteruskan kepada Hakim Tinggi / Penelaah untuk dilakukan penelaahan apakah pengaduan tersebut dapat atau tidak untuk ditindaklanjuti, pejabat penelaah pada Badan Pengawasan MA RI terdiri dari :

- a. Penelaahan oleh Inspektur Wilayah/Hakim Tinggi Pengawas: apabila materi laporan Pengaduan terkait dengan pelanggaran : Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan, Teknis yudisial dan Hukum Acara, Disiplin militer, Maladministrasi dan Pelayanan Publik

- b. Penelaahan oleh Auditor apabila materi laporan Pengaduan terkait dengan pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
  - c. Penelaahan oleh Auditor Kepegawaian apabila terkait pelanggaran : Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara; Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Diperiksa Badan Pengawasan: 122 pengaduan
- Tim Pemeriksa Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan pada satker dimana pengaduan berasal. Hasil pemeriksaan dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada Kepala Badan Pengawasan dan oleh Kepala Badan Pengawasan dibuat surat pengantar rekomendasi dari Tim Pemeriksa kepada Ketua Kamar Pengawasan. Bila Pengaduan terbukti maka dibuat Memorandum yang diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan setelah disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung, dikembalikan kepada Badan Pengawasan untuk dibuatkan Surat Pengantar Penjatuhan Hukuman Disiplin yang ditujukan kepada Dirjen terkait (tenaga teknis) dan Sekretaris Mahkamah Agung (tenaga non teknis). Bila tidak terbukti, oleh Ketua Kamar Pengawasan dikembalikan kepada Kepala Badan Pengawasan untuk diterbitkan Surat Pemulihan Nama Baik.
- Dijawab dengan surat: 632 pengaduan
- Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan tidak semuanya merupakan pengaduan sesuai dengan syarat yang ditentukan, tetapi terdapat pengaduan yang berisi substansi perkara yang masih berjalan pada pengadilan tingkat pertama, Banding, Kasasi dan PK. Selain itu pelaksanaan eksekusi perkara perdata maupun perkara pidana dan aparat peradilan diluar lingkungan Mahkamah Agung, terhadap surat pengaduan tersebut langsung dijawab kepada yang bersangkutan.
- Delegasi Pengadilan Tingkat Banding : 203 pengaduan
- Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan penelaahan oleh Inspektur Wilayah I s/d IV, Hakim Tinggi Pengawas, hasil dari penelaahan tersebut salah satunya adalah didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Dan hasil pemeriksaan tersebut berupa LHP

disampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan proses penyelesaian selanjutnya.

- Delegasi Pengadilan Tingkat Pertama: 913 pengaduan

Surat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan telaah oleh Hakim Tinggi Pengawas, hasil dari penelaahan tersebut salah satunya adalah didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk dilakukan Klarifikasi dan Konfirmasi serta hasilnya disampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan proses penyelesaian selanjutnya.

- Delegasi Internal : 264 pengaduan

Merupakan salah satu bentuk tindak lanjut atas suatu pengaduan materi laporan Pengaduan yang tidak terkait dengan pelanggaran : Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan, Teknis yudisial dan Hukum Acara, Disiplin militer, Maladministrasi dan Pelayanan Publik tetapi berkaitan dengan substansi pemeriksaan Kasasi maupun PK atau permasalahan lainnya yang berkaitan dengan eselon 1 maupun eselon 2 pusat, karenanya Badan Pengawasan mendelegasikan kepada unit eselon 1 maupun unit eselon 2 pada Mahkamah Agung RI dalam bentuk Memorandum.

- Masih dalam proses penyelesaian : 127 pengaduan

Merupakan pengaduan yang menjadi kasus atau dibentuk Tim belum bisa dilaksanakan karena terkait anggaran, administrasi pembuatan surat, penggabungan surat delegasi, proses pembuatan surat pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan.

- Diarsipkan : 321 pengaduan

Kriteria pengaduan yang diarsipkan adalah surat yang tidak mencantumkan identitas pelapor dan terlapor, data dukung, identitas nama pengadilan dan nomor perkara yang dimaksud.



## Sasaran 1

### Indikator kinerja ke-2 : *Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi*

Tabel 3.3 *Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi*

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %
		2016			2017		
2	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi.	100 (189 LHP)	131 (247 LHP)	131	100 170 LHP	134 228 LHP	134


Tahun 2017 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan menindaklanjuti 122 LHP ditambah dengan hasil pemeriksaan dari pengadilan tingkat banding sebanyak 106 LHP sehingga menghasilkan 228 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP menjadi rekomendasi kepada pimpinan dalam pertimbangan pemberian hukuman disiplin. Informasi hukuman disiplin dipublikasikan per-triwulan melalui *website* Badan Pengawasan ([bawas.mahkamahagung.go.id](http://bawas.mahkamahagung.go.id)). Perbandingan LHP dari pengaduan yang diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2015 sejumlah 186 LHP, dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan 139 LHP.
- Tahun 2016 sejumlah 247 LHP, dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan 19 LHP

Tabel 3.4: Hukuman Disiplin Tahun 2017

NO	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah	Persentase
		Berat	Sedang	Ringan		
1	Hakim	9	9	42	60	38,4%
2	Panitera	2	4	5	11	7,05%
3	Sekretaris	3	-	3	6	3,84%
4	Panitera Muda	4	-	10	14	8,97%
5	Panitera Pengganti	5	3	13	21	13,46%
6	Jurusita	4	1	4	9	5,76%
7	Jurusita Pengganti	3	1	5	9	5,76%
8	Pejabat Struktural	4	1	4	9	5,76%
9	Staf	11	1	3	15	9,61%
10	Pegawai Tidak	-	-	2	2	1,28%

Tetap					
<b>JUMLAH</b>				<b>156</b>	

 **Sasaran 2 :** Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran ini terdiri dari 12 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	114 LHP	125 LHP	110%
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	95 LHP	102 LHP	107%
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13 LHP	14 LHP	108%
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	21 LHP	24 LHP	114%
	5. Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	6. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	7. Jumlah Penguatan APIP/ Consulting	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	8. Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	9. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	10. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	7 LHP	7 LHP	100%

	11. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	12. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LKjIP	74 LKjIP	100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

## Sasaran 2

### **Indikator kinerja ke-1 : Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler**

Tabel 3.6 Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
1	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100 (100 LHP)	169 (169 LHP)	169	100 (114 LHP)	110 (125 LHP)	110

Pada tahun 2017 Badan Pengawasan telah melakukan pengawasan reguler terhadap 125 satker dan telah melampaui dari targer 114 satker,hal ini tidak terlepas dengan adanya penambahan hakim tinggi pengawas dan kebijakan baru dari Badan Pengawasan yang memfungsikan Satuan Tugas untuk melaksanakan pemeriksaan di Mahkamah Agung.

Perbandingan pengawasan reguler tahun 2016 dengan 2017 mengalami penurunan sejumlah 44 satker hal ini hal ini terjadi karena pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya.

## Sasaran 2

### **Indikator kinerja ke-2 : Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas**

Tabel 3.7 Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
2	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	100 (100 LHP)	101 (101 LHP)	101	100 (95 LHP)	108 (102 LHP)	107

Pada tahun 2107 Badan Pengawasan melaksanakan kegiatan audit kinerja/integritas pada 102 satker dan ini telah melampaui dari target yang ditetapkan 95 satker, hal ini adalah untuk mengofterimalkan anggaran yang telah ditetapkan.

Perbandingan pengadilan yang sudah dilakukan audit Kinerja/Integritas, yaitu: Tahun 2016 jumlah satker 101 dibandingkan dengan tahun 2017 sejumlah 102 satker terdapat peningkatan 1 satker, hal ini terjadi karena anggaran yang tersedia telah disesuaikan dengan anggaran yang telah ditentukan.

## Sasaran 2

### **Indikator kinerja ke-3 : Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa**

Tabel 3.8 Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
3	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	100 (12 LHP)	100 (12 LHP)	100	100 (13 LHP)	108 (14 LHP)	108

Pada tahun 2017 Badan Pengawasan melakukan kegiatan audit Barang dan Jasa terhadap 14 satker dan telah melampaui target yang ditetapkan 1 sakter hal ini dilakukan untuk meningkatkan kegiatan PBJ dan melakukan optimalisasi kegiatan.

Perbandingan pengadilan yang telah dilakukan audit Barang dan Jasa tahun 2016 sejumlah 12 satker terjadi peningkatan sebesar 2 satker pada tahun 2017 hal ini dilakukan dilakakukan karena adanya anggaran yang memungkinkan untuk kegiatan tersebut.

## Sasaran 2

### **Indikator kinerja ke-4 : Jumlah Pemeriksaan keuangan yang dilakukan**

Tabel 3.9 Jumlah Pemeriksaan keuangan yang dilakukan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
4	Jumlah Pemeriksaan keuangan yang dilakukan	100 (20 LHP)	155 (31 LHP)	155	100 (21 LHP)	185 (24 LHP)	114

Kegiatan pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan dan memberikan keyakinan yang memadai bagi pengelola keuangan dilingkungan Mahkamah Agung dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

Tahun 2017 Badan Pengawasan melakukan kegiatan pemeriksaan keuangan sejumlah 24 sakter melampaui target yang telah ditentukan sejumlah 21 satker sehingga terdapat kenaikan 3 satker, hal ini karena adanya penambahan kapasitas auditor sehingga tim yang dibentuk mengalami penambahan dari tahun sebelumnya.

Perbandingan pelaksanaan pemeriksaan keuangan tahun 2016 sejumlah 31 satker mengalami penurunan sebesar 7 satker pada tahun 2017, hal ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya.

## Sasaran 2

### *Indikator kinerja ke-5 : Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang*

Tabel 3.10 Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
5	Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	100 (140 orang)	102 (143 orang)	102	100 (80 orang)	100 (80 orang)	100

Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Hakim Pengawas Bidang, Badan Pengawasan Mahkamah Agung berupaya dan secara terus menerus melakukan pengawasan secara optimal dan bersinergi dengan Hakim Pengawas Bidang. Pada tahun 2017 Badan Pengawasan telah melakukan Pembinaan Hakim Pengawas Bidang dengan target dan realisasi sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta 80 orang.

Perbandingan Hakim Pengawas Bidang tahun 2016 dengan tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 63 orang hal ini terjadi karena ada pengurangan anggaran yang berdampak pada volume peserta dari tahun sebelumnya.

## Sasaran 2

### **Indikator kinerja ke-6 : Jumlah Assesment yang telah dilakukan**

Tabel 3.11 Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
6	Jumlah Assesment yang telah dilakukan	100 (20 orang)	100 (20 orang)	100	100 (1 kegiatan/21 orang)	100 (1 kegiatan/21 orang)	100

Penilaian dan kapasitas potensi diri berkaitan dengan aspek psikologi perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan bagi Hakim Pengawas/Hakim Yustisial dan staf.

Tahun 2017 Badan Pengawasan telah melaksanakan 1 kegiatan assesment yang diikuti oleh 21 orang peserta, pelaksanaan assesment ini telah sesuai dengan target maupun realisasi yang telah ditentukan yaitu sebanyak 21 orang.

Perbandingan assesment tahun 2016 dengan tahun 2017 antara target dan realisasi terjadi peningkatan 1 orang hal ini sesuai dengan permintaan dan kebutuhan Badan Pengawasan.

## Sasaran 2

### **Indikator kinerja ke-7 : Jumlah Penguatan APIP/ Consulting**

Tabel 3.12 Jumlah Penguatan APIP / Consulting

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
7	Jumlah Penguatan APIP / Consulting	100 (160 orang)	201 (321 orang)	201	100 (2 kegiatan 340 orang)	100 (2 kegiatan 340 orang)	100

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015, Badan Pengawasan tahun 2017 telah melakukan kegiatan penguatan APIP (*Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*) sejumlah 2 kegiatan yang diikuti oleh 340 orang peserta, target maupun realisasi sesuai dengan rencana dan ketersediaan anggaran ada.

Perbandingan penguatan APIP tahun 2016 dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sejumlah 19 peserta, hal ini dikarenakan ada ketersediaan anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut.

## Sasaran 2

**Indikator kinerja ke-8 :** Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan

Tabel 3.13 Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
8	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	100 (150 orang)	224 (336 orang)	224	100 (2 kegiatan/ 184 orang)	100 (2 kegiatan/ 184 orang)	100

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan adalah untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan integritas aparatur peradilan dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan peradilan.

Tahun 2017 Badan Pengawasan telah melakukan 2 kegiatan dengan jumlah peserta 418 orang, sehingga target dan realisasi telah sesuai dengan perencanaan dan ketersediaan anggaran yang ada.

Perbandingan kegiatan sosialisasi pengelolaan pengaduan tahun 2016 dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 152 orang, hal ini karena ketersediaan anggaran untuk sosialisasi pengelolaan pengaduan.

## Sasaran 2

**Indikator kinerja ke-9 :** Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana

Tabel 3.14 Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
9	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	100 (2 kegiatan)	100 (2 kegiatan)	100	100 (2 kegiatan)	100 (2 kegiatan)	100

*Quality assurance* merupakan kegiatan sistimatis pekerjaan yang diimplementasikan dalam sistem penjaminan mutu sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan peradilan. Pada tahun 2017 kegiatan *Quality assurance* telah dilakukan pada dua tempat kegiatan hal ini sesuai dengan program yang telah ditentukan.

## Sasaran 2

**Indikator kinerja ke-10** : Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Yang Terlaksana

Tabel 3.15 Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang terlaksana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
10	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang terlaksana	100 (40 LHP)	100 (40 LHP)	100	100 (7 LHP)	100 (7 LHP)	100

Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK tahun 2017, terget yang ditentukan 7 LHP sesuai dengan realisasi yang direncanakan 7 LHP, hal sesuai dengan program dan dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan. Bila diperbandingkan dengan tahun 2016 ada penurunan 37 LHP, ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran.

## Sasaran 2

**Indikator kinerja ke-11** : Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim Yang Terlaksana

Tabel 3.16 Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim Yang Terlaksana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
11	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim Yang Terlaksana	100 (4 kegiatan)	100 (3 kegiatan)	100	100 (2 kegiatan)	100 (2 kegiatan)	100

Tahun 2017 Badan Pengawasan melakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim yaitu antara target dengan realisasi sesuai yang telah ditentukan yaitu 2 kegiatan, dengan penjatuhan hukuman kepada Hakim yang bersangkutan berupa hukuman disiplin masing-masing pemberhentian dengan hormat, bila diperbandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan dari 3 yang diajukan ke sidang majelis kehormatan hakim



menjadi 2, hal ini tidak terlepas bahwa semua penjatuhan sanksi dapat diajukan ke Sidang Majelis Kehormatan Hakim.

## Sasaran 2

**Indikator kinerja ke-12 : Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan**

Tabel 3.17 Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2016			2017		
12	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100 (74 LKjIP, 3 kegiatan)	100 (74 LKjIP, 3 kegiatan)	100	100 (74 LKjIP, 3 kegiatan)	100 (74 LKjIP, 2 kegiatan)	100

Tahun 2017 telah dilakukan evaluasi LKjIP terhadap 74 satuan kerja yang terdiri dari 7 eselon I pusat dan 67 satker tingkat banding, yang memperoleh penilaian A yaitu 1 satker, penilaian BB sebanyak 41 satker, penilaian B sebanyak 30 satker, penilaian CC dan C masing-masing 1 satker. Target evaluasi dan realisasi tahun 2017 mengalami penurunan dari 3 kegiatan menjadi 2 kegiatan hal ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran. Perbandingan evaluasi tahun 2016 dengan 2017, maka terjadi penurunan penilaian yaitu tahun 2016 yang memperoleh nilai A sebanyak 7 satker, sedangkan tahun 2017 hanya 1 satker, demikian pula dengan penilaian B mengalami dari 22 satker menjadi 30 satker, penilaian CC dari 3 satker menjadi 1 satker dan penilaian BB dan C masing-masing 1 satker.

### C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja

Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan, sejalan dengan hal tersebut Badan Pengawasan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	2.642	2.642	100%	Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan (1077)	-	-	-	
	- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	170	228	134%		Rp 6.673.221.000	Rp 6.665.710.014	99,88%	
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	- Persentase pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	114	125	110%		Rp 5.306.857.000	Rp 5.306.698.590	99,99%	
	- Persentase pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13	14	108%		Rp 409.598.000	Rp 408.266.200	99,67%	
	- Persentase pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja/integritas	95	102	107%		Rp 3.319.683.000	Rp 3.319.566.187	99,99%	
	- Persentase Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	21	24	114%		Rp 524.227.000	Rp 523.922.700	99,94%	
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	- Persentase rakor quality assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2	2	100%		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (1079)	Rp 833.839.000	Rp 833.424.400	99,95%
	- Persentase LKJIP yang selesai di evaluasi	74	74	100%			Rp 34.998.000	Rp 34.901.700	99,72%
	- Persentase Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	1	1	100%			Rp 279.015.000	Rp 279.013.200	99,99%
	- Persentase Pegawai yang mengikuti assessment	1	1	100%			Rp 138.296.000	Rp 138.276.701	99,98%
	- Persentase Penguatan APIP / Consulting	2	2	100%	Rp 733.253.000		Rp 732.667.600	99,92%	
	- Persentase Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	2	2	100%	Rp 985.915.000		Rp 985.904.454	99,99%	
	- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	7	7	100%	Rp 191.000.000		Rp 190.988.699	99,99%	
	- Persentase Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang	2	2	100%	Rp 43.370.000		Rp 40.991.000	94,51%	

	dilaksanakan							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Tahun 2017 perolehan Pagu anggaran Badan Pengawasan yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 31.400.000.000,- dengan realisasi penggunaan pagu anggaran tersebut sebesar Rp. 31.363.812.655,- atau dengan prosentasi sebesar 99,88 % dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 36.187.345,- atau 0,12 %, dengan demikian Badan Pengawasan telah melaksanakan pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2017. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun 2017. Laporan ini juga merupakan upaya menampilkan secara riil dan konkrit seluruh kegiatan yang telah ditetapkan yang hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum hasil capaian sasaran-sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa hal yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikut.
2. Realisasi target yang terlampaui dari rencana semula semata-mata karena adanya penyesuaian yang harus dilakukan dengan menambah kegiatan tanpa melakukan pembebanan anggaran yang tersedia.
3. Pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,88 % tersebut dapat dikategorikan sebagai kinerja yang baik.

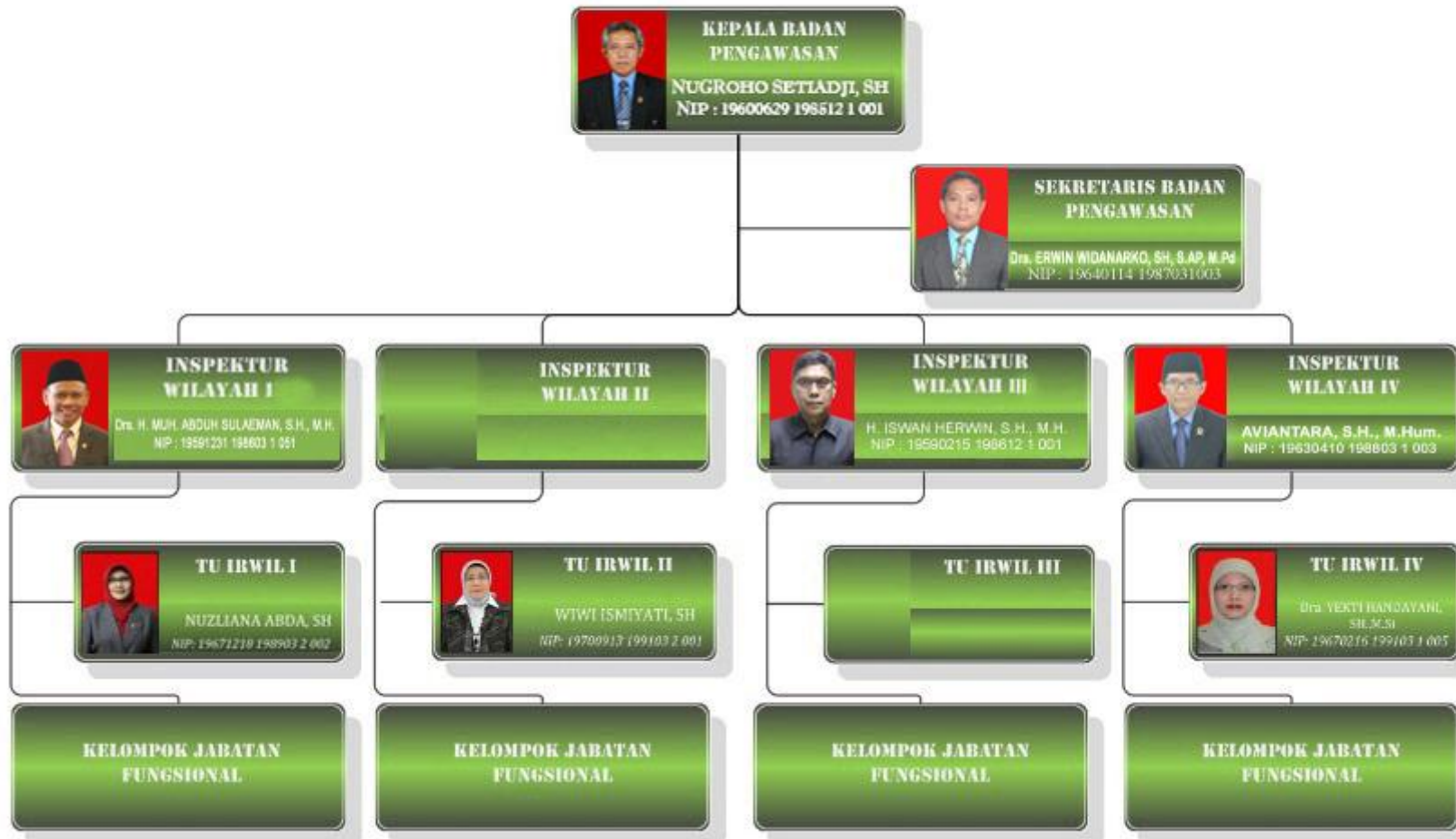
#### **B. Saran**

Hasil yang telah diperoleh agar dapat dipertahankan dan bahkan untuk lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

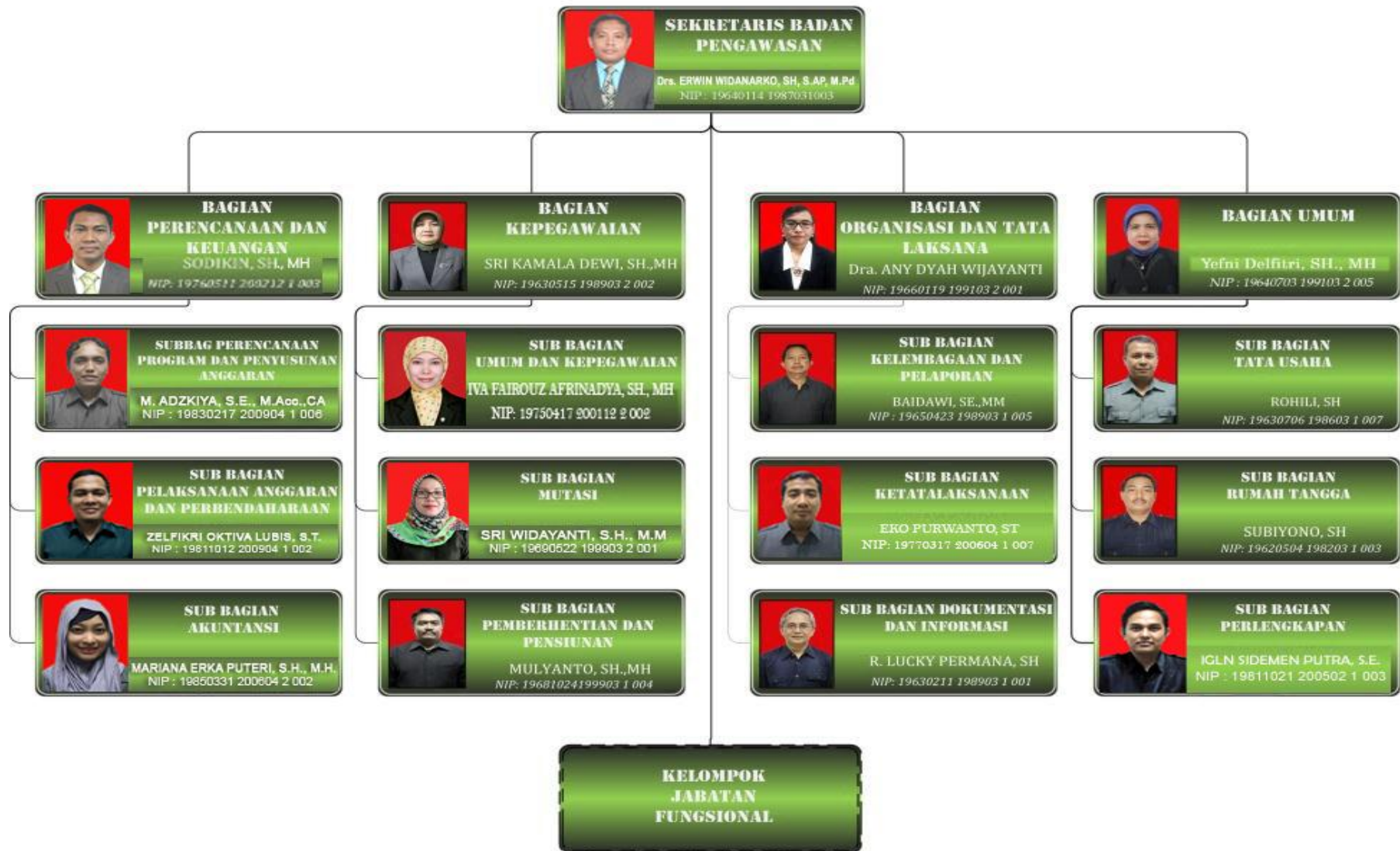
# LAMPIRAN

# STRUKTUR ORGANISASI

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN**





# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR :50A / BP/SK/VIII/2016  
TENTANG  
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Badan Pengawasan 2015 – 2019 dan kebijakan Mahkamah Agung, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang merupakan ukuran atau indikator sebagai informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan pada lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini, adalah merupakan acuan kinerja dilingkungan Badan Pengawasan.

KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.

KETIGA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat dipergunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 3 Agustus 2016

Kepala Badan Pengawasan

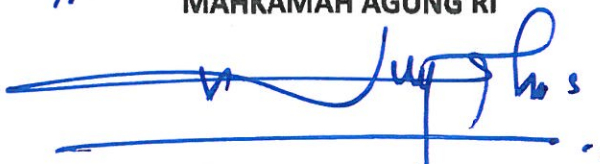


NUGROHO SETIADJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI  
 NOMOR : 50A /BP/SK/VIII/2016  
 TANGGAL : 9 Agustus 2016

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang diterima dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi dibagi Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan Triwulan website dari Ortala

*As*  
 KEPALA BADAN PENGAWASAN  
 MAHKAMAH AGUNG RI  
  
 NUGROHO SETIADI

# MATRIK RENSTRA 2015 - 2019



REVIEW BASELINE 2014  
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Kode	Program/Kegiatan/Output/Komponen	Sasaran	Indikator	VOLUME					APBN 2014			PRAKIRAAN MAJU			
				2014	2015	2016	2017	Satuan	Operasional	Non Ops	Jumlah	2015	2016	2017	2018
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah								4.581,2	24.268,8	28.850,0	30.072,6	38.123,9	41.366,4	42.904,6
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah 1	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Inspektur Wilayah 1	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Inspektur Wilayah 1	64	101	119	123	Laporan	0,0	14.275,1	14.275,1	3.837,5	4.353,9	4.789,4	5.268,2
	Pemeriksaan Kasus	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	44	44	46	47	Laporan	0,0	1.526,8	1.526,8	1.539,2	1.744,4	1.921,0	2.113,1
	Pemeriksaan Reguler	Terselenggaranya manajemen administrasi peradilan dan administrasi umum	Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, serta penangan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	20	24	31	32	Laporan	0,0	1.177,2	1.177,2	1.026,7	1.319,6	1.451,6	1.596,7
	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah audit pengadaan barang dan jasa wilayah 1		3	6	7	Laporan				128,5	145,6	160,2	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	29	30	36	37	Laporan		1.038,5	1.038,5	1.143,1	1.142,3	1.256,6	1.382,2
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah 2	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Inspektur Wilayah 2	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Inspektur Wilayah 2	116	124	143	146	Laporan				3.242,5	4.426,7	4.869,4	5.356,2
	Pemeriksaan Kasus	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	49	68	70	70	Laporan		1.439,0	1.439,0	1.795,7	2.319,1	2.551,0	2.806,1
	Pemeriksaan Reguler	Terselenggaranya manajemen administrasi peradilan dan administrasi umum	Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, serta penangan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	33	20	26	27	Laporan		1.098,4	1.098,4	341,7	936,0	1.029,6	1.132,5
	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah audit pengadaan barang dan jasa wilayah 2		1	9	9	Laporan				26,2	145,6	160,2	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	34	35	39	40	Laporan		932,7	932,7	1.078,9	1.026,0	1.128,6	1.241,4

5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah 3	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Inspektur Wilayah 3	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Inspektur Wilayah 3	89	93	112	115	Laporan			4.085,4	4.336,1	4.769,8	3.157,7
	Pemeriksaan Kasus	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	38	42	40	40	Laporan	1.527,1	1.527,1	1.695,6	1.801,3	1.981,4	2.179,5
	Pemeriksaan Reguler	Terselenggaranya manajemen administrasi peradilan dan administrasi umum	Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, serta penangan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	26	20	34	35	Laporan	1.217,1	1.217,1	994,7	1.726,4	1.899,1	2089,0
	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah audit pengadaan barang dan jasa wilayah 3		4	6	7	Laporan			191,7	145,6	160,2	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	25	27	32	33	Laporan	602,6	602,6	1.197,4	662,8	729,1	802,0
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah 4	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Inspektur Wilayah 4	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Inspektur Wilayah 4	42	46	55	58	Laporan			2.617,2	3.087,2	3.395,9	3.735,4
	Pemeriksaan Kasus	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penanganan pengawasan teknis, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	18	16	20	20	Laporan	951,7	951,7	810,3	1.179,7	1.297,7	1.427,4
	Pemeriksaan Reguler	Terselenggaranya manajemen administrasi peradilan dan administrasi umum	Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, serta penangan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	12	19	13	14	Laporan	725,7	725,7	1.183,7	808,2	889,0	977,9
	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah audit pengadaan barang dan jasa wilayah 4		3	4	5	Laporan			206,0	145,6	160,2	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	12	8	18	19	Laporan	867,0	867,0	417,2	953,7	1.049,0	1.153,9

5260	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan											7.174,1	10.579,4	11.575,4	12.733,3
	Monitoring/Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	40	45	50	55	Laporan		2.216,2	2.216,2	1.686,1	4.109,6	4.520,6	4.972,7
	Pembinaan Sistem Pengawasan	Terlaksananya pembinaan sistem pengawasan	Jumlah sosialisasi Sistem Pengawasan kepada aparat pengadilan dan masyarakat	-	265	265	265	orang					1.186,0	1.304,4	1.434,8
	Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan pengaduan	Jumlah sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat	200	265	265	265	orang	1.078,0	1.078,0	1.078,0		1.186,0	1.304,4	1.434,8
	Revisi Laporan Keuangan RKA-KL	Terlaksananya revisi laporan keuangan/revisi RKA-KL	Jumlah revisi laporan keuangan/revisi RKA-KL	36	55	59	63	Laporan	1.000,0	1.000,0	1.311,2	1.686,8	1.816,0	2.041,0	
	Quality Assurance Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Quality Assurance Pengelolaan Keuangan	Jumlah Quality Assurance kepada pengelola keuangan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya		200	265	265	laporan			1.961,9	2.000,0	2.200,0	2.400,0	
	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB di MA RI	Terlaksananya Evaluasi PMPRB	Jumlah Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya		4	15	20	laporan			1.077,6	410,0	430,0	450,0	
	Evaluasi Hasil Pemerilaan Kinerja	Terlaksananya evaluasi hasil pemeriksaan kinerja	Jumlah evaluasi hasil pemeriksaan kinerja								59,3				
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung		Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan						4.581	6.493,6	11.074,8	9.115,9	11.341,6	11.966,5	12.653,8
1079.001	Dokumen Perencanaan			20	30	40	50	Laporan		1.507,6	1.507,6	659,4	841,7	841,7	341,7
1079.002	Dokumen Pelaporan									1.884,6	1.884,6	1.818,6	1.490,7	1.490,7	1.490,7
1079.003	Pengembangan Tenaga Pengawas									2.007,9	2.007,9	727,9	2.007,9	2.007,9	2.007,9
1079.994	994.Layanan Perkantoran														
	001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan			12	12	12	12	Bulan Layanan	3.487,8			3.487,8			
	002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			12	12	12	12	Bulan Layanan	1.093,4			1.867,7	2.054,5	2.259,9	2.485,9
	011 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah			4	4	4	4	kegiatan		193,7	193,7				
	012 Tersedianya pakaian kerja			1	1	1	1	kegiatan		11,8	11,8				
	013 Terpeliharanya peralatan kantor			12	12	12	12	Bulan Layanan		104,1	104,1				
	014 Terlaksananya pengiriman surat dinas			12	12	12	12	Bulan Layanan		75,6	75,6				
	015 Terpeliharanya Jaringan/ Sistem Informasi dan Peralatan IT			12	12	12	12	Bulan Layanan		30,2	30,2				
	016 Terlaksananya pelaksanaan barang dan jasa			12	12	12	12	Bulan Layanan		13,2	13,2				
	017 Pengadaan Pakaian Dinas Pejabat/Hakim Tinggi/Struktural/Staf			1	1	1	1	kegiatan		118	118,0				
	018 Sewa mesin fotokopi			12	12	12	12	Bulan Layanan		120	120,0				
	019 Jamuan rapat/koordinasi/terima tamu/delegasi			12	12	12	12	Bulan Layanan		174,2	174,2				
	996. PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI														
	011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor			52	10	20	30	unit	252,73	252,7	229,5	752,7	752,7	752,7	
1079.004	Terlaksananya Sidang Majelis Kehormatan Hakim			10	20	12	14	laporan	325	325,0	325,0	357,5	393,3	432,6	



# SK TIM PENYUSUNAN LKjIP 2017



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR : 79 / BP/SK/IX/2017**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. Bahwa guna penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2017, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan LKjIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

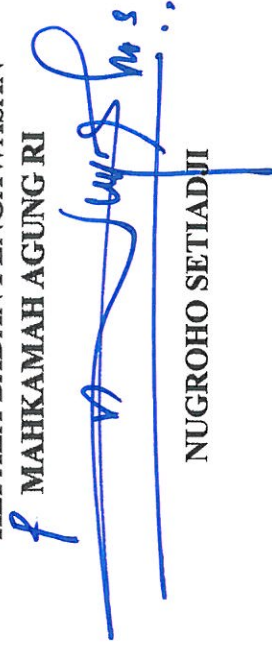
#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2017
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Semua biaya yang berkaitan dengan Penyusunan LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2017 dibebankan pada DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 September 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
f MAHKAMAH AGUNG RI

  
NUGROHO SETIADJII


Lampiran: Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
Nomor : **79**/BP/SK/IX/2017

Tentang : Pembentukan Panitia Penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP)  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2017

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Nugroho Setiadji, SH.	Kepala Badan Pengawasan	Penanggung Jawab
2.	Drs.Erwin Widanarko,SH.,S.AP,M.Pd	Sekretaris Badan Pengawasan	Ketua
3.	Dra. Any Dyah Wijayanti	Kabag Organisasi dan Tataaksana	Anggota
4.	R. Lucky Permana, S.H., M.H.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota
5.	Baidawi, SE, MM	Kasubbag Kelembagaan dan Pelaporan	Anggota
6.	Eko Purwanto, ST, MH	Kasubbag Ketatalaksanaan	Anggota
7.	Ferry T. Ferdiansyah, SE, Ak	Auditor	Anggota
8.	Imam Purnomo, SE, Ak	Auditor	Anggota
9.	Muhammad Anis, SE, Ak	Auditor	Anggota
10.	Rama Rahim, SE, MM, MBA	Auditor	Anggota
11.	Hendra Basry, SE	Auditor	Anggota
12.	M. Adzkiya, SE, Ak, MAcc	Auditor	Anggota
13.	Muhammad Huzaifah, Skom	Staf Bagian Ortala	Anggota
14.	Jhon Richo	Staf Bagian Ortala	Anggota
15.	Dewi Putri Noviandari, S.Kom.	Staf Bagian Ortala	Anggota
16.	Arief Purwoko, S.Kom	Staf Bagian Ortala	Anggota

Jakarta, **25** September 2017

**KEPALA BADAN PENGAWASAN**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**

  
\_\_\_\_\_  
**NUGROHO SETIADJI**

# RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017



**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017  
(RKT)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100%			-	170	Rp6.673.221.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	114 LHP			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	97	Rp5.306.857.000
	2. Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	95 LHP				95	Rp3.319.683.000
	3. Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13 LHP				12	Rp 409.598.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	21 LHP				21	Rp 524.227.000
	5. Jumlah Quality Assurance	2 kegiatan					1079 Dukungan

	pengelolaan keuangan yang terlaksana			Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	yang mendapat peningkatan kompetensi sistem pengawasan		
	6. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	3 kegiatan (74 LKjIP)		Badan Pengawasan Mahkamah Agung		3	Rp 34.998.000
	7. Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	1 kegiatan				1	Rp 279.015.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	1 kegiatan				20	Rp 138.296.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	2 kegiatan				2	Rp 733.253.000
	10. Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	2 kegiatan				2	Rp 985.915.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	7 LHP			002 Dokumen tata kelola	7	Rp 191.000.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 kegiatan			004 Pelaksanaan MKH	4	Rp 43.370.000

# RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018



**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018  
(RKT)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100% (148 LHP)			-	170	Rp6.326.055.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	89 LHP			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	97	Rp4.443.172.000
	2. Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	78 LHP				95	Rp3.349.108.000
	3. Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	8 LHP				12	Rp 348.500.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 LHP				21	Rp 434.840.000
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE				3	Rp 154.970.000
					001 Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan		

	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan		1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	kompetensi sistem pengawasan	2	Rp 764.343.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan				1	Rp 803.527.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	2 Kegiatan				20	Rp 200.000.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	1 Kegiatan				2	Rp 764.387.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	1 Kegiatan				2	Rp 893.731.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	15 LHP			002 Dokumen tata kelola	7	Rp 250.000.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP			004 Pelaksanaan MKH	4	Rp 100.000.000

**PERJANJIAN KINERJA (PK)  
KEPALA BADAN PENGAWASAN  
TAHUN 2017 DAN 2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2017, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2017

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

Nugroho Setiadji, S.H.

Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum

**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100%		Rp6.673.221.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	114 LHP	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp5.306.857.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	95 LHP		Rp3.319.683.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	13 LHP		Rp 409.598.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	21 LHP		Rp 524.227.000
	5. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 kegiatan		Rp 833.839.000
	6. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	3 kegiatan (74 LKjIP)		Rp 34.998.000
	7. Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	1 kegiatan		Rp 279.015.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	1 kegiatan		Rp 138.296.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	2 kegiatan		Rp 733.253.000

	10. Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	2 kegiatan		Rp 985.915.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	7 LHP		Rp 191.000.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 kegiatan		Rp 43.370.000

Jumlah Anggaran : **Rp19.473.272.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum  
Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

Nugroho Setiadji, S.H.

Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum



**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100%		Rp6.326.055.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	89 LHP		Rp4.443.172.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	78 LHP		Rp3.349.108.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	8 LHP		Rp 348.500.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 LHP		Rp 434.840.000
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE		Rp 154.970.000
	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan		Rp 764.343.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan		Rp 803.527.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	2 Kegiatan		Rp 200.000.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	1 Kegiatan	Rp 764.387.000	
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	1 Kegiatan	Rp 893.731.000	



	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	15 LHP		Rp 250.000.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP		Rp 100.000.000

Jumlah Anggaran : **Rp. 18.832.633.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**PERJANJIAN KINERJA (PK)  
SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN  
TAHUN 2017 DAN 2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilik Srihartati, SH, MH.  
Jabatan : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2017, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

  
NUGROHO SETIADJI, S.H.

Sekretaris Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

  
LILIK SRIHARTATI, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 kegiatan	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 833.839.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	3 kegiatan (74 LKjIP)		Rp 34.998.000
	Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang	1 kegiatan		Rp 279.015.000
	Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	1 kegiatan		Rp 138.296.000
	Jumlah Penguatan APIP / Consulting	2 kegiatan		Rp 733.253.000
	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	2 kegiatan		Rp 985.915.000
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	7 LHP		Rp 191.000.000
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 kegiatan		Rp 43.370.000

Jumlah Anggaran : **Rp3.239.686.000,-**

Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erwin Widanarko  
Jabatan : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**  
Nama : Nugroho Setiadji  
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

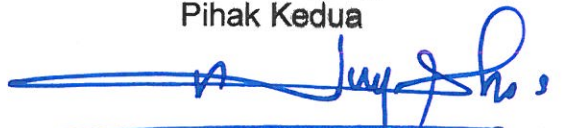
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

  
Nugroho Setiadji

Sekretaris Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

  
Erwin Widanarko



**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	1 Kegiatan	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 764.343.000
	Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	1 Kegiatan		Rp 803.527.000
	Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	2 Kegiatan		Rp 200.000.000
	Jumlah Penguatan APIP / Consulting	1 Kegiatan		Rp 764.387.000
	Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	1 Kegiatan		Rp 893.731.000
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	15 LHP		Rp 250.000.000
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP		Rp 100.000.000

Jumlah Anggaran : **Rp. 3.775.988.000,-**

Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**PERJANJIAN KINERJA (PK)  
INSPEKTUR WILAYAH I  
TAHUN 2017 DAN 2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H  
Jabatan : Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : NUGROHO SETIADJI, S.H.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

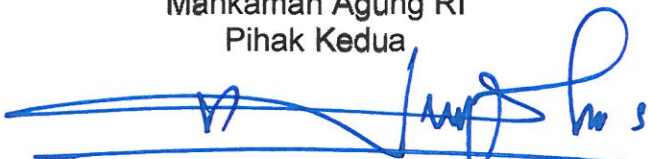
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2017, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

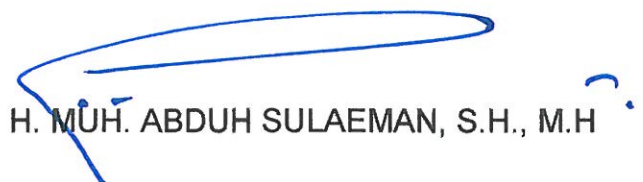
**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

  
NUGROHO SETIADJI, S.H.

Inspektur Wilayah I  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

  
Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H., M.H



**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017 INSPEKTUR WILAYAH I BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti ( <b>Surat Pengaduan</b> )	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi ( <b>kasus</b> )	100%		Rp1.807.623.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	35 LHP		Rp1.433.518.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	30 LHP		Rp1.007.667.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	3 LHP		Rp 101.714.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	5 LHP		Rp 160.595.000

Jumlah Anggaran : **Rp4.511.117.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H  
Jabatan : Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

  
Nugroho Setiadji, S.H.

Inspektur Wilayah I  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

  
Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H

**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 INSPEKTUR WILAYAH I BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti ( <b>Surat Pengaduan</b> )	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi ( <b>kasus</b> )	100%		Rp1.510.635.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	29 LHP		Rp1.379.400.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 LHP		Rp1.045.261.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	2 LHP		Rp 75.112.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	4 LHP		Rp 170.425.000
Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	20 LHE	Rp 41.095.000		

Jumlah Anggaran : **Rp. 4.221.928.000. ,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)  
INSPEKTUR WILAYAH II  
TAHUN 2017 DAN 2018**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASNAHWATI, SH., MH  
Jabatan : Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : NUGROHO SETIADJI, S.H.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

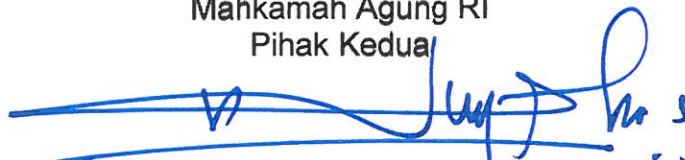
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2017, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

  
NUGROHO SETIADJI, S.H.

Inspektur Wilayah II  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

  
ASNAHWATI, SH., MH

**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti <b>(Surat Pengaduan)</b>	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi <b>(kasus)</b>	100%		Rp1.985.615.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	26 LHP		Rp1.331.091.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	33 LHP		Rp 743.459.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa / audit kepegawaian	4 LHP		Rp 85.293.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	10 LHP		Rp 129.562.000

**Jumlah Anggaran : Rp4.275.020.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aviantara, S.H., M.Hum

Jabatan : Plt. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

Nugroho Setiadji, S.H.

Plt. Inspektur Wilayah II  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

Aviantara, S.H., M.Hum

**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti <b>(Surat Pengaduan)</b>	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi <b>(kasus)</b>	100%		Rp 2.256.720.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	25 LHP		Rp 982.522.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 LHP		Rp 873.409.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa / audit kepegawaian	2 LHP		Rp 58.520.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 75.040.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	25 LHE		Rp 32.970.000

**Jumlah Anggaran : Rp 4.279.181.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan



**PERJANJIAN KINERJA (PK)  
INSPEKTUR WILAYAH III  
TAHUN 2017 DAN 2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H

Jabatan : Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : NUGROHO SETIADJI, S.H.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

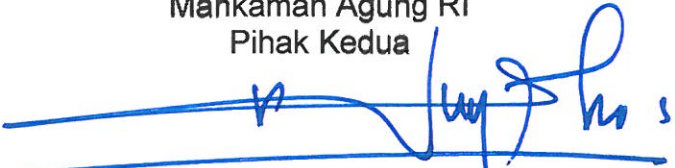
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2017, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

  
NUGROHO SETIADJI, S.H.

Inspektur Wilayah III  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

  
H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H

**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017 INSPEKTUR WILAYAH III BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti ( <b>Surat Pengaduan</b> )	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi ( <b>kasus</b> )	100%		Rp1.802.027.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	36 LHP		Rp1.455.383.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	24 LHP		Rp 924.984.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	3 LHP		Rp 96.280.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	3 LHP		Rp 101.539.000

Jumlah Anggaran : **Rp4.380.213.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Iswan Herwin, S.H., M.H  
Jabatan : Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

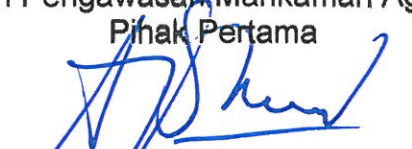
**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

  
Nugroho Setiadji, S.H.

Inspektur Wilayah III  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

  
H. Iswan Herwin, S.H., M.H



**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 INSPEKTUR WILAYAH III BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti ( <b>Surat Pengaduan</b> )	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi ( <b>kasus</b> )	100%		Rp1.538.206.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	20 LHP		Rp1.029.737.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 LHP		Rp 943.809.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	2 LHP		Rp 87.620.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 94.355.000
Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	19 LHE	Rp 41.605.000		

Jumlah Anggaran : **Rp. 3.735.332.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)  
INSPEKTUR WILAYAH IV  
TAHUN 2017 DAN 2018**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H

Jabatan : Plt. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : NUGROHO SETIADJI, S.H.

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

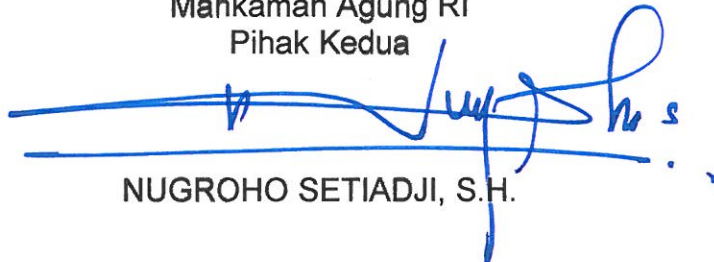
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2017, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

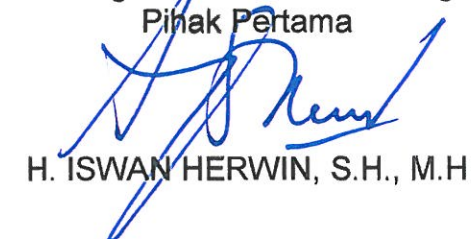
Jakarta, Januari 2017

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua



NUGROHO SETIADJI, S.H.

Plt. Inspektur Wilayah IV  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama



H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H

**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017 INSPEKTUR WILAYAH IV BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti <b>(Surat Pengaduan)</b>	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi <b>(kasus)</b>	100%		Rp1.077.956.000
Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	17 LHP		Rp1.086.865.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	8 LHP		Rp 643.573.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	3 LHP		Rp 126.311.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	3 LHP		Rp 132.531.000

Jumlah Anggaran : **Rp3.067.236.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aviantara, S.H., M.Hum  
Jabatan : Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2018, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

Nugroho Setiadji, S.H.

Inspektur Wilayah IV  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

Aviantara, S.H., M.Hum

**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018 INSPEKTUR WILAYAH IV BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti <b>(Surat Pengaduan)</b>	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi <b>(kasus)</b>	100%		Rp1.020.494.000
Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	15 LHP		Rp1.051.513.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	8 LHP		Rp 486.629.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	2 LHP		Rp 127.248.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 95.020.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	10 LHE		Rp 39.300.000

Jumlah Anggaran : **Rp. 2.820.204.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan